



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU (STUDI PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TONDO)

Afandi

Universitas Tadulako

Nasir Mangngasing

Universitas Tadulako

Nuraisyah

Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Korespondensi penulis: afandhyanwar@gmail.com

ABSTRACT Afandi. B10222053. Thesis Title: Implementation of Waste Management Policy in Palu City (Study of Waste Management in Tondo Village). Mentors Nasir Mangngasing and Nuraisyah. This research is to determine the implementation of waste management policies in Palu City (Study of Waste Management in Tondo Village). The type of research used is descriptive qualitative. Data types use primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The informant withdrawal technique uses purposive. The data analysis used is the Miles, Huberman and Saldana model, namely data collection, data presentation, data condensation and drawing conclusions. The waste problem in Tondo Village is basically the responsibility of all parties, including the community, companies and local government. The habit of people who like to throw rubbish out of place makes waste management in this area increasingly ineffective and difficult to overcome. This habit of throwing rubbish carelessly is caused by a lack of education and facilities at rubbish dumps and final disposal sites. In fact, the current increase in population in Tondo Village will have an impact on the balance of the city, including waste production. The greater the population of an area, the more waste produced every day will also increase. Based on the results of research conducted, the implementation of the Waste Management Policy in Tondo Village is relatively ineffective, there are still many problems that need to be resolved so that waste handling can be more optimal, starting from aspects, human resources, budget resources and equipment resources. Apart from that, the disposition aspect related to sanctions and fines is relatively inconsistent in its implementation. The bureaucratic structure related to standard operational procedures in implementing policies, all of which have different problems from one another, so that commitment from the government and the community is needed to manage waste together.

Keywords: Policy, Management, Waste and Society

ABSTRAK Afandi. B10222053. Judul Tesis: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu (Studi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tondo). Pembimbing Nasir Mangngasing dan Nuraisyah. Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu (Studi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tondo). Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive*. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles, Huberman dan Saldana, yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan. Permasalahan sampah di Kelurahan Tondo pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua pihak baik masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah setempat. Kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah bukan pada tempatnya membuat pengelolaan sampah di wilayah ini semakin tidak efektif dan sulit untuk diatasi. Kebiasaan suka membuang sampah sembarangan ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan fasilitas tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir. Padahal peningkatan populasi di Kelurahan Tondo saat ini akan berdampak pada keseimbangan kota termasuk dalam produksi sampah. Semakin banyak populasi penduduk suatu wilayah, maka sampah yang diproduksi setiap harinya juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tondo relatif belum efektif, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan sehingga penanganan sampah bisa lebih optimal yaitu mulai dari aspek, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Selain itu, aspek disposisi

terkait dengan sanksi dan denda yang relatif belum konsisten dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi terkait dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan, semuanya memiliki permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara bersama-sama.

Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Sampah dan Masyarakat

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di daerah perkotaan seperti Kelurahan Tondo membutuhkan penanganan yang profesional. Pengelolaan yang baik akan mencerminkan kota yang bersih dan sehat, sedangkan pengelolaan yang buruk akan menyebabkan lingkungan tidak menarik, berbau, dan menjadi sumber penyakit. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Tanpa perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, masalah ini akan semakin kompleks, seperti sampah yang tidak terangkut dan pembuangan sampah liar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik adalah salah satu cara untuk mencapai lingkungan tersebut. Implementasi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo telah menjadi perhatian pemerintah setempat, namun masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang.

Pertumbuhan sampah yang terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk telah menjadi masalah utama bagi kota-kota besar, termasuk Palu. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Palu membentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Masalah lingkungan hidup, termasuk sampah, mempengaruhi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup. Sampah di Kelurahan Tondo mencapai lebih dari 4 ton per hari, dengan tumpukan sampah terlihat di berbagai titik, termasuk rumah kost mahasiswa. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah kendaraan sampah, dan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jauh.

Data menunjukkan bahwa sosialisasi dari aparat Kelurahan Tondo dan Dinas Lingkungan Hidup kurang efektif dan interaktif, serta sumber daya manusia dan kendaraan operasional masih terbatas. Sanksi pidana dan denda dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 belum direalisasikan secara konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan mengacu pada teori Edward III dalam Indiahono (2009:31-34). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu (Studi Pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore).

KAJIAN TEORI

Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Semarang. Produksi sampah di kota Semarang per harinya mencapai 800 ton/hari dengan daya tampung TPA sebesar 400 ton/hari. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Semarang sekitar 1.5 juta jiwa dan juga menjadi salah satu tujuan dari urbanisasi. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya produksi sampah yang diakibatkan oleh masyarakatnya.

Untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan Perda Pengelolaan Sampah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Yusrival. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pegelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Keadaan lingkungan di kawasan padat penduduk khususnya Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba belum dapat dikatakan sehat dan bersih disebabkan masih terdapat tumpukan - tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan lahan yang kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPS Bukit Asri secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1. Perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri telah dilakukan dengan mengadakan kerjasama, komitmen, dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. 2. Perilaku implementor bawah juga telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS. 3. Perilaku kelompok sasaran yakni masyarakat memberikan respon positif dan mendukung dengan adanya pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Karna dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan khususnya di daerah padat penduduk.

Isra Fadlun Sufi. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, 2022. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi perda melalui media elektronik, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas kebersihan, pelatihan motivasi untuk pegawai serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian pada hakekatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain” oleh karena itu maka pendekatan yang tepat dalam penelitian ini melalui metode penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyata, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif.

Penelitian kualitatif di mulai dengan pengumpulan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat (*common sense*) manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum pengumpulan data (informasi) akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data (informasi) yang dikumpulkan terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku

atau kegiatan yang tampak. Informasi itu dipelajari dan ditafsirkan dengan usaha memahami maknanya sesuai dengan sudut pandangan sumber datanya. Makna informasi-informasi yang bersifat khusus itu dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan-kepentingan praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan oleh manusia harus dibuang di tempat yang sudah disediakan atau jauh dari pemukiman karena membuang sampah dekat dengan pemukiman penduduk beresiko terhadap kesehatan masyarakat.

Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di Kota-kota besar. Kemampuan pengelola dan penanganan sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk dimana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit. Perencanaan penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks, tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah akan tetapi harus melibatkan pihak swasta dan setiap rumah tangga dengan penanganan sampah tergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap rumah tangga, masyarakat, swasta dan pemerintah

dalam menyimpan, mengumpulkan, membawa dan menimbun sampah dengan koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.

Masalah sampah di Kelurahan Tondo diatur dalam beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu, Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah pengelolaan kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kebersihan bertujuan terciptanya keterpaduan tanggungjawab antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, indah dan teratur. Dalam pasal 1 ayat 2, yang tercantum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup merupakan upaya yang terpadu dan tersistem yang dilakukan dengan tujuan membuat lingkungan hidup agar senantiasa lestari dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan yakni dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo, dengan menggunakan pendekatan teori dari Edward III yang terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, penjelasan hasil penelitian yakni sebagai berikut:

4.2.1.1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi kebijakan itu sendiri, memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implententors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah

menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi antar organisasi pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo,

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan di atas, bahwa sosialisasi dalam bentuk baliho sudah sering dilakukan kepada seluruh masyarakat terkait dengan larangan membuang sampah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa komunikasi dan sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Tetapi apabila sosialisasi atau penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan, maka akan membuat kebijakan tersebut akan terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Olehnya itu, implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan laksanakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari salah seorang informan yang sudah cukup lama bekerja di DLH, bahwa pada saat pertama kalinya kebijakan ini diimplementasikan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini, karena kurangnya sosialisasi. Olehnya karena itu, sangat dituntut keterlibatan *stakeholder* dalam penyampaian kebijakan ini, karena mereka merupakan kunci utama dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan ini. Bila melihat realitanya, sosialisasi hanya dilakukan diawal perda ini diterapkan.

4.2.1.2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Selain sumber daya manusia, sumber daya lain juga patut untuk diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu, karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, namun tidak didukung dengan sumber daya finansial dan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan, maka akan menjadi persoalan yang pelik untuk meralisasikan apa yang hendak menjadi tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud di dalam penelitian ini, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan/sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.

1) Sumber Daya Manusia

Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya

mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang kesiapan aparat pemerintah yang ada di Kelurahan Tondo dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah,

Hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua informan di atas mengatakan bahwa sampai saat ini, pengawas lapangan yang tercatat secara resmi oleh DLH hanya satu orang. Padahal idealnya, untuk wilayah seukuran Kelurahan Tondo minimal harus ada 4 satuan tugas, agar pengawasan di lapangan dapat lebih efektif dan maksimal. Dengan demikian, ketika semakin bertambah jumlah satuan tugas di lapangan maka semakin besar pula harapan dalam menjaga kebersihan di Kota Palu umumnya dan Kelurahan Tondo pada khususnya. Selain sumber daya manusia tersebut yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, masyarakat juga membutuhkan informasi yang cukup dari satuan tugas tentang perkembangan pengelolaan sampah di Kota Palu. Dengan demikian, sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implemerutors*) itu harus mempengaruhi orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Sesuai dengan apa yang dikatakan Herdy, terkait dengan sumber daya anggaran atau dukungan dana, beliau mengatakan bahwa:

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tumpukan sampah di beberapa lorong di Kelurahan Tondo, sudah sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pasalnya, tumpukan sampah ini bukan hanya mengganggu pengguna jalan karena makin hari makin menumpuk di bahu jalan hingga berserakan ke badan jalan, akan tetapi juga menimbulkan bau yang tidak sedap serta dapat menyebabkan banjir karena sebagian sampah telah menutupi saluran pembuangan air atau selokan. Kondisi ini sudah sangat dikhawatirkan oleh warga masyarakat karena gundukan sampah yang terdapat di beberapa titik sudah sangat memprihatinkan. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, dan mungkin juga masyarakat bisa dilibatkan, misalnya pengunjung rumah

sakit yang sudah cukup lama menjaga keluarganya yang sakit agar diberikan sosialisasi yang mudah mereka pahami dan mengerti.

3) Sumber Daya Peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi/pelaksanaan suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas, pasti akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mursidin tentang dukungan peralatan, beliau mengatakan bahwa:

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dibutuhkan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan, dalam artian bahwa disatu pihak harus dijamin tidak terdapat hambatan pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar tersedia. Menurut peneliti bahwa penanganan sampah di Kelurahan Tondo masih mengalami beberapa kendala yaitu masih terbatasnya armada pemuat sampah dan kontainer sampah yang harus ditambah. Oleh karena itu, banyak masyarakat berharap ada sinkronisasi program dari OPD-OPD teknis. Misalnya, pengadaan bak sampah, unit mobil, untuk menunjang penanganan sampah di wilayahnya. Selain itu, kita butuh TPA yang representatif yang bisa menampung limbah rumah tangga masyarakat Kelurahan Tondo. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari aparat DLH bahwa saat ini Pemda melalui DLH sudah ada rencana untuk menambah armada dan bak ambrol, sehingga sampah masyarakat seluruhnya bisa dimuat ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan adalah pelaksana kebijakan, dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik administrasi tertentu. Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Oleh karena itu tanpa dukungan sumber daya yang memadai mustahil pelaksanaan kebijakan akan tercapai sesuai dengan keinginan organisasi.

4.2.1.3. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2010:104) bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para

pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara demokratis, jujur, adil dan transparan sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran, khususnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Tondo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mursidin, mengatakan bahwa:

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti masih ada warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat pembuangan sampah yang sebenarnya, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mepedulikan dan mau mematuhi aturan tersebut. Padahal Kelurahan Tondo sebagai pusat pendidikan seharusnya tidak tercemari oleh sampah warga masyarakat. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali terlihat perilaku warga masyarakat tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya tindakan tegas dari pihak aparat pemerintah untuk menindak tegas warga masyarakat yang mengindahkan aturan tersebut. Dengan demikian, kebijakan penerapan Pengelolaan sampah juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah nantinya akan mampu menyelamatkan nasib warga Kelurahan Tondo secara keseluruhan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para informan di atas, menurut Edward III bahwa disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

4.2.1.4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:106), bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi,

dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar instruksinya akan terdistorsi. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mursidin, bahwa:

Menurut peneliti bahwa peran serta antar unit organisasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyalaras, atau pepaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya. Disamping itu melalui hubungan kerja antar unit, berbagai masalah dan kendala kebijakan pengelolaan sampah dapat diminimalisir. Menurut peneliti bahwa kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas instansi, membuat kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, segala bentuk hukuman dan sanksi yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tidak dapat terealisasi. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang jauh, dan truk pengangkut sampah yang hanya berjumlah 2 unit saja, menyebabkan terjadinya penumpukan sampah karena truk pengangkut sampah hanya mampu mengangkut 2 ret dalam sehari sehingga kondisi tersebut mau tidak mau membuat sampah menumpuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tondo, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah relatif belum efektif. Beberapa aspek penyebab sehingga kebijakan tersebut relatif belum maksimal yaitu satuan tugas pengawas lapangan yang ada di Kelurahan Tondo hanya 1 orang. Begitupula dengan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber daya peralatan berupa unit armada dan bak sampah yang dioperasikan, masih sangat terbatas jumlahnya 6 unit Kaisar, 2 Mobil Pick up Sampah dan 3 Bak Kontainer, sementara wilayah Kelurahan Tondo cukup luas dan sampah yang begitu banyak. Semuanya masih sangat memprihatinkan karena ketidakmampuan daerah untuk merealisasikan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Terkait dengan disposisi, bahwa belum ada konsistensi dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat. Begitupula dengan struktur birokrasi yaitu terkait dengan ketiadaan standar operasional dalam penanganan pengelolaan sampah, yang mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif semua pihak sehingga pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo bisa teratasi, namun apa yang menjadi harapan tersebut belum sepenuhnya efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afifuddin dan Saebani Beni Ahmad. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Pustaka Setia.

- Agustino Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Ali Farid. Alam Syamsu Andi. Wantu Sastro M. 2012. *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung.
- Dunn N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dinamyc Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Islamy Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Keban T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Luankali Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Amelia. Jakarta.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Nugroho Riant. 2008. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Miles B. Mattew, Huberman A. Michael & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Sage Publication.
- Parsons Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Sinaga M. Anggiat. 2006. *Birokrasi Dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia*. STIA-LAN. Jakarta.
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugandi Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta. Graham Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitataif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie Kencana Inu, Tandjung Djamaluddin, Modeong Supardan. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan S. Nogi Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.

- Thoha Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thoha Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Widodo Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Wahab Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wicaksono Widya Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

B. Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Palu, Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

C. Jurnal dan Sumber Lain

- Yusrival. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pegelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*.
- Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Isra Fadlun Sufi. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, 2022*.